

CAKRAWALA PENDIDIKAN

JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN



PENERBIT
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Jurnal Ilmiah Pendidikan

Penerbit:

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
Universitas Negeri Yogyakarta

Redaksi

Ketua : Prof. Pardjono, Ph.D.
Sekretaris : Sri Sumardiningih, M.Si.
Anggota : Prof. Slamet P.H, Ph.D.
Prof. Darmiyati Zuhdi, Ed.D.
Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro
Prof. Dr. Husaini Usman
Prof. Dr. Abdul Gafur
Prof. Wawan S. Suherman, M.Ed.
Prof. Dr. Mundilarto
Prof. Dr. Sukadiyanto
Sumarno, Ph.D.
Dr. Slamet Suyanto
Losina Purnastuti, Ph.D.

Redaktur Penyelia : Dr. Kastam Syamsi
Dr. Agus Widyantoro

Desain Sampul : Martono, M.Pd.

Sekretariat : Dra. Sri Ningsih
Sri Ayati, S.Pd.
Ganjar Triyono, S.Pd.
Mardiasih, A.Md.

Alamat Redaksi: LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang,
Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 586168 psw. 233; (0274) 550852;
Fax. (0274) 550838, e-mail: lppmp@uny.ac.id.

Tulisan yang dimuat di *Cakrawala Pendidikan* belum tentu merupakan cerminan sikap dan atau pendapat
Penyunting Pelaksana, Penyunting, dan Penyunting Ahli. Tanggung jawab terhadap isi
dan atau akibat dari tulisan, tetap terletak pada penulis

Nomor ISSN: 0216-1370

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Jurnal Ilmiah Pendidikan
Mei 2012, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 110/Dikti/Kep/2009, tanggal 5 Desember 2009 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Cakrawala Pendidikan* dinyatakan terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah Nasional sampai dengan Desember 2012 ✓

PENERBIT

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
Universitas Negeri Yogyakarta

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Jurnal Ilmiah Pendidikan
Mei 2012, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Daftar Isi	iii
1. Pengembangan Model Penilaian Otentik Penjasorkes Materi Permainan Invasi Bolabasket di Sekolah Dasar <i>Tomoliyus</i>	1-10
2. Pendidikan Nilai Holistik untuk Membangun Karakter Anak di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta <i>Rukiyati</i>	11-22
3. Pengembangan Bahan Ajar Seni Musik Berbasis Pembelajaran Kontekstual <i>Ardipal</i>	23-36
4. Pendidikan Khusus pada Awal Menuju Inklusi (Sebuah Refleksi Historis di Jawa) <i>Mumpuniarti</i>	37-52
5. Implementasi Manajemen Strategik Berbasis Kemitraan dalam Meningkatkan Mutu SMK <i>Zainal Arifin</i>	53-65
6. Evaluasi Program Pembinaan Cabang Olahraga Karate di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Sugeng Purwanto</i>	65-77
7. Pengembangan Tes Diagnostik Bahasa Prancis melalui Analisis Kesalahan Berbahasa <i>Dwiyanto Djoko Pranowo</i>	78-97
8. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia <i>Sunarso, Sodik Azis Kuntoro, dan Abdul Gafur</i>	98-112
9. Model Unit Produksi SMK: Studi Kasus di SMKN 2 Pengasih Kulon Progo Yogyakarta <i>Tawardjono Us.</i>	113-124
10. Dinamika Struktur dan Kultur dalam Penerapan Desentralisasi Pendidikan <i>Siti Irene Astuti D.</i>	125-141
11. Dilema Pendidikan Politik sebagai Basis Transformasi Gerakan .. <i>Nasiwan</i>	142-156

DILEMA PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI BASIS TRANSFORMASI GERAKAN

Nasiwan

FIS Universitas Negeri Yogyakarta (email: iwan1uny@yahoo.com)

Abstrak: Dilema Pendidikan Politik sebagai Basis Transformasi Gerakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dilema yang terjadi pada kegiatan pendidikan politik, yang dilakukan oleh organisasi Gerakan *Jemaah Tarbiyah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kritis, data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dilengkapi dengan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, pendidikan politik pada fase gerakan dakwah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jemaah tarbiyah melakukan transformasi gerakan dengan mentransmisikan berbagai khasanah pengetahuan, sikap dan kesadaran politik yang dimiliki kepada anggota *Jemaah Tarbiyah*. Kedua, ada kecenderungan pendidikan politik dalam perjalanannya bergeser perannya lebih berfungsi sebagai instrument indoktrinasi bagi partai sebagai pewarisan nilai-nilai dan pembenar berbagai kebijakan yang diputuskan oleh elit partai.

Kata Kunci: *pendidikan politik, transformasi, partai politik*

Abstract: The Dilemma of Political Education as a Basis of Movement Transformation. This research aims to know the dilemma occurred within political education activities conducted by *Jemaah Tarbiyah* organization. The approach utilized in this research is qualitative approach employing critical analysis. The data were collected through documentation and in-depth interview. The research findings show: first, political education within the preaching movement phase has a capability to influence *Jemaah Tarbiyah* to transform the movement by transmitting various knowledge, attitude, and political awareness owned by the members of *Jemaah Tarbiyah*. Second, there is a tendency that the role of political education has shifted to be a doctrine instrument of the political parties as values inheritance and legitimating of the policies issued by political party's elites.

Keywords: *political education, transformation, political parties*

PENDAHULUAN

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi kelangsungan hidup serta regenerasi

suatu organisasi politik. Melalui kegiatan pendidikan politik anggota suatu organisasi politik, jemaah organisasi gerakan keagamaan mendapatkan

transfer nilai dan warisan nilai-nilai dari generasi sebelumnya. Lebih dari itu melalui proses pendidikan politik anggota suatu partai politik disamping mendapatkan pengetahuan –wawasan politik juga dibentuk sikap dan kesadaran politiknya.

Melalui proses pendidikan politik anggota suatu organisasi politik dan warga negara pada umumnya memiliki kemungkinan untuk memiliki sikap yang idealis disatu sisi bersikap mendukung kebijakan negara-pemerintah yang sesuai dengan aspirasi rakyat serta pada waktu yang sama juga memungkinkan untuk memiliki sikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Penegasan tentang urgensi pendidikan politik '*political education*' antara lain disampaikan oleh (Gutmann, 1999: 287) "... kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan politik—merupakan penanaman dari berbagai nilai-nilai kebaikan, pengetahuan dan keterampilan yang merupakan keniscayaan untuk dapat melakukan partisipasi politik –menjadi kewajiban moral utama dari berbagai tujuan pendidikan publik dalam masyarakat demokratis. Pendidikan politik menyiapkan warga negara untuk terlibat dalam menghasilkan kesadaran masyarakat mereka dan kesadaran untuk reproduksi sosial yang ideal bukan hanya sekedar pendidikan demokrasi tetapi juga demokrasi politik".

Terminologi pendidikan politik '*political education*' sering dibedakan dengan sosialisasi politik '*political socialization*'. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketengahkan terlebih dahulu

pengertian pendidikan politik, sebelum pembahasan dilanjutkan ke persoalan utama penelitian ini.

Di samping terminologi *political education*, dikenal juga terminologi lain yang perlu diklarifikasi, yakni term sosialisasi politik. Term *political socialization* dan *Political Education* menurut pandangan John J. Patrick merupakan term yang berbeda. Sosialisasi politik berkaitan dengan suatu proses dengan cara itu rakyat belajar mengambil norma-norma, nilai-nilai, sikap dan menerima tingkah laku dan mempraktikannya melalui sistem yang sedang berlaku, sosialisasi politik merujuk pada penguasaan individu-individu tentang budaya politik atau norma-norma untuk mengelola kewenangan mendistribusikan keuntungan dan kerugian "*the authoritative distribution of advantages and disadvantages*". Tujuan yang dituju melalui proses tersebut adalah perkembangan individu-individu yang dapat menerima motivasi-motivasi, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang relevan dengan sistem politik dari masyarakat mereka dan mewariskan norma-norma tersebut pada generasi penerus. (Renshon, 1997: 191). Rosamond (2002: 58) menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses atau serangkaian proses melalui itu rakyat belajar tentang politik dan memperoleh nilai-nilai politik.

Sementara itu, Bay menyatakan bahwa *political education* lebih luas daripada *political socialization*. Lebih lanjut dia menyatakan, sebagaimana pada umumnya pendidikan, pendidikan ilmu politik harus memiliki tujuan untuk membebaskan mahasiswa dari tirai

selubung kearifan konvensional, dari tabu-tabu politik dan simbol-simbol politik dengan demikian memiliki kemungkinan untuk membuat kemampuan untuk memilih bagaimana menjalani kehidupan dan dengan ide-ide politik sebagai pribadi yang independen dengan kekuatan melakukan kritik yang optimal.

Menurut Pranger, pendidikan politik dalam makna yang luas menekankan pada terciptanya tertib politik '*political order*' dan warga negara sebagai aktor yang kreatif dalam sistem tersebut. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Entwistle bahwa "*political education, in contrast to socialization, seyogyanya membantu generasi muda belajar untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar politik mereka dan mempertimbangkan untuk memberikan jawaban-jawaban alternatif.*"

Perbedaan makna antara *political socialization* dengan *political education* sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengembangan kurikulum dan desain instruksional antara *political socialization* dengan *political education*. Menurut Patrick, letak perbedaannya adalah bahwa mahasiswa yang mempelajari sosialisasi politik memiliki perhatian utama berkaitan dengan persoalan pemeliharaan sistem politik, terkait dengan pewarisan *orthodoxy* politik. Mereka mempertanyakan bagaimana individu-individu belajar untuk mendukung status quo sosial politik, sebagaimana terbaca dalam norma-norma politik dan kehadiran peran politik permanen (Renshon, 1997:193).

Pendidikan politik (*political education*) memiliki perhatian yang lebih

luas. Pendidikan politik tidak hanya membatasi individu untuk belajar mendukung tatanan politik yang berlaku, tetapi juga meminta individu untuk belajar menciptakan dan mengubah tatanan politik. "*They should ask not merely how individuals learn to conform so that political orders endure; but they also should ask how individuals learn to create and to change political orders*" (Renshon, 1997: 193).

Dalam konteksnya dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada warga negara, dimaknai sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 2006:256).

Berangkat dari berbagai perspektif sebagaimana telah dikemukakan di atas, menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam bagaimana peran pendidikan politik sebagai basis dari transformasi gerakan. Selain itu, dilema yang dialami oleh pendidikan politik sebagai instrument untuk melakukan transformasi tersebut.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analitis kritis. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan dan kajian penelitian ini dilakukan dengan hati-hati, selektif sehingga akan menghasilkan pembahasan yang objektif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai dokumen yang terkait dengan tema yang dikaji dalam peneli-

tian ini. Metode wawancara mendalam dipakai untuk melengkapi mengumpulkan data yang belum dapat diraih melalui studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dilakukan deskripsi, kategorisasi, reduksi, dan seleksi untuk mendapatkan data yang sah.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi peserta kursus pendidikan politik di Kabupaten Sleman Yogyakarta, Pengurus DPD PKS Sleman, Pengurus DPW PKS Yogyakarta, Pengurus DPP PKS Indonesia, tokoh-tokoh penting Gerakan Jemaah Tarbiyah, serta informan dari kalangan akademisi. Trianggulasi sumber dan isi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL

Pendidikan Politik dan Dinamika Gerakan

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian dan pembahasan. Analisis berikut ini akan menyampaikan keterkaitan antara manhaj pendidikan politik (*manhaj tarbiyah siyasiyah*) Gerakan Tarbiyah dengan transformasi gerakan, yakni dari Gerakan Tarbiyah ke gerakan politik (partai politik). Dalam kaitan ini, dilihat dari sisi genealogi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai politik yang sesungguhnya telah ada jauh sebelum pendeklarasiannya pada 9 Agustus 1998 dengan wajah Partai Keadilan. Cikal bakal PK/PKS telah ada sejak pertengahan tahun 1980-an yang dikenal dengan kelompok tarbiyah (Hilal, 2003:87).

Pada masa Gerakan Tarbiyah itulah sebenarnya telah dilakukan penyiapan

sumber daya manusia (SDM) melalui suatu aktivitas pendidikan politik yang di kalangan mereka dikenal dengan kegiatan "tarbiyah", yang kemudian istilah tarbiyah dilekatkan untuk memberi nama gerakan tersebut dengan nama 'Jemaah Tarbiyah' (Macmudi, 2008:10-11). Jemaah Tarbiyah setelah pendeklarasiannya ke dalam partai politik, kegiatan tarbiyah dengan berbagai variasi serta adaptasi terus dipertahankan. Kegiatan tarbiyah menjadi basis bagi mereka yang diyakini sebagai basis bagi eksistensi PKS. Partai ini pada awal kelahirannya selanjutnya melakukan konsolidasi jaringan kepartaian, sebagaimana dikemukakan oleh Cahyadi Takariawan:

"Setelah deklarasi, kemudian dilakukan konsolidasi secara personal dan struktural, yakni mengumpulkan para aktivis dakwah di setiap wilayah untuk membentuk struktur PK".

Pendidikan politik atau *tarbiyah siyasiyah* mulai terwadahi dalam kurikulum yang dibakukan sekitar 1421 H. Namun, jauh sebelum eksistensinya sebagai partai politik, pendidikan politik sebenarnya telah ditanamkan sebagai fondasi dasar guna merealisasikan kemashlahatan dunia. *Tarbiyah siyasiyah* dipahami PKS sebagai salah satu aspek dari rangkaian tarbiyah secara keseluruhan, di samping adanya tarbiyah akidah, ibadah, dan akhlaq. PKS memandang politik dan dakwah sebagai satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan sehingga strategi pembinaannya ditempuh pada dua sisi, yakni tarbiyah untuk menguatkan eksistensi dakwah dan jama'ah melalui sentuhan *tarbiyah harokiyah*, dan tarbiyah untuk

menguatkan eksistensi peran politik partai yang dilakukan melalui *tarbiyah hizbiyah* yang di dalamnya terdapat esensi *tarbiyah siyasiyah*. Keduanya terwadahi sebagai *tarbiyah islamiyah* yang pada hakikatnya menekankan setiap kader tarbiyah pada pembentukan *syakh-siyah islamiyah* (kepribadian muslim) sebagai teladan bagi manusia dan *syakh-siyah daiyah* (kepribadian dai) sebagai penyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam. (Wawancara dengan Takariawan, tanggal 24 Mater 2010, di Yogyakarta).

Terdapat tiga tahapan interaksi politik gerakan Islam sebagai bagian dari manifestasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS, meliputi hal-hal sebagai berikut.

Tahap Pertama: Penguasaan Ilmu Politik (*al-'ilm as-siyasi*). Penguasaan ilmu politik dibutuhkan untuk menentukan keshalihan langkah-langkah yang diambil saat terdapat dorongan dan respon politik dari dalam maupun dari luar, seperti berikut.

- *Muthola'ah siyasiyah* (kritik atas literatur politik), meliputi: kajian blibliotik, bertemu dengan narasumber, pengamatan terhadap dinamika politik lokal, nasional, maupun internasional.
- *Munawaroh siyasiyah* (dialog politik) dengan beragam aliran politik yang ada, peta dan rambu yang jelas, baik untuk lapangan konsepsional maupun operasional.
- *Mutaba'ah siyasiyah* (pelaksanaan evaluasi) terhadap seluruh langkah yang telah diambil sehingga akan diketahui seluruh ruang lingkup politik telah dipahami dengan baik.

Tahap Kedua: Melakukan Aksi Penyadaran (*Tan'iyah As-Siyasiyah*). Langkah tersebut ditempuh dengan menumbuhkan solidaritas internal para kader, baik yang terjun pada lapangan politik atau mereka yang mendukung dari luar serta diikuti dengan upaya penumbuhan lembaga-lembaga politik internal sebagai wahana *tadribat* (latihan) amal aktivis yang disiapkan terjun dalam kancah politik. Dalam tahap ini, diikuti pula dengan upaya melakukan beberapa aksi politik, seperti: penyebaran teori politik Islam, aksi-aksi politik (*al-munawaroh as-siyasi*) dalam skala lokal, propaganda politik (*ad-di'yan as-siyasi*), pembentukan organisasi politik (*at-tanzim as-siyasi*), dan penetrasi politik (*al-ikhtiroq as-siyasi*).

Tahap Ketiga: Partisipasi Politik (*al-musyarakah as-siyasi*). Diawali dengan partisipasi sosial (*musyarakah ijtima'iyah*) dalam bentuk keterlibatan aktif dalam upaya pengokohan dan penyehatan kondisi masyarakat dalam segala aspeknya, ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, dan maliyah. Dari hal tersebut diharapkan akan muncul pribadi-pribadi yang dikenal dan mengakar pada masyarakat, selanjutnya akan terbentuk dukungan masyarakat dan program-program yang membumi serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan basis dukungan masyarakat yang kokoh, langkah berikutnya diharapkan akan menjadi mudah. Pembentukan institusi politik akan memiliki dukungan publik yang memadai, begitu pula ketika memasuki arena pemilu (*al-intikhobiyah*), parlemen, maupun pemerintahan (Jasiman, 2005: 10).

Tahapan, strategi dan model pendidikan politik yang dieksperimentasikan

oleh partai politik --yang lahir dari rahim Gerakan Islam -- memungkinkan partai tersebut melakukan transformasi diri dan melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan politik (*political opportunity structure*) (Roy, 1999). Bentuk pendidikan politik (*tarbiyah siyasah*) yang dalam derajat tertentu mampu untuk mempengaruhi terjadinya transformasi gerakan -- dari 'gerakan dakwah tarbiyah', *social movement* ke *model political movement* -- Transformasi ini berlangsung dengan memanfaatkan momentum dan peluang politik yang ada (reformasi tahun 1998) hal ini dapat dibaca dengan jelas pada kelahiran dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Danamik, 2002:115).

Untuk menganalisis sistem pendidikan politik PKS, akan dianalisis pada tiga dimensi pokok, yakni: dimensi tujuan, metode, dan kurikulum cakupan (Kurikulum Tarbiyah Siyasah Buku 1, 2000). Tujuan pendidikan politik PKS pada fase gerakan dakwah adalah mewujudkan keberdayaan politik yang berakar pada doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kewajiban setiap muslim sehingga memungkinkan setiap kader menjadi mandiri yang pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi pada pembentukan umat dan masyarakat politik yang mandiri pula. Dalam konsekuensi logis keterlibatannya di ranah politik, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS hendak pula memberikan batasan-batasan moralitas politik kepada pengurus dan kader, memberikan kerangka konseptual tentang landasan-landasan syar'i terkait aktivitas berpolitik, serta memberikan penguatan terhadap *musy-*

arahah siyasiah (partisipasi politik) (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2000).

Sebagaimana penuturan Idham Ananta Timur, bahwa esensi *tarbiyah siyasiah* PKS sebagai *long life education* ditujukan pada ketercapaian tiga aspek, yakni: kepribadian politik, sikap politik, serta mobilisasi politik kader (wawancara dengan Idham Ananta Timur, 25 Maret 2010). Hal senada dikemukakan pula oleh Takariawan yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan politik PKS adalah memunculkan *wa'yu siyasi*, menguatkan *musyarakah siyasiah*, serta mengkristalkan kepribadian politik kader dan pengurus. Sementara itu, bentuk gerakan politik moral yang diekspresikan oleh PKS dimaksudkan untuk memberikan suatu keteladanan sebagai manifestasi pendidikan politik kepada masyarakat (wasancara dengan Takariawan, 24 Maret 2010). Adapun metode yang diimplementasikan PKS dalam pendidikan politik meliputi: ceramah, diskusi, praktek (berpikir kritis, inovatif dan kreatif, provokasi dan advokasi, pengambilan keputusan, manajemen kampanye, dan perencanaan), mandiri (tugas membaca, menulis, dan orasi politik), *case study* (studi kasus), panel, *personal action plan*, dan demonstrasi/aksi (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2000).

Kurikulum cakupan dalam manhaj/format pendidikan politik PKS berdasarkan rangkuman peneliti akan terdiri atas kelompok materi sebagai berikut.

- Keislaman:
 - Syumuliyatul Islam dan sejarah politik Islam
 - Tauhid: Paradigma keyakinan muslim

- Islam sebagai pedoman hidup
- Islam sebagai landasan filosofi dan landasan operasional dalam berpolitik
- Dakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*
- Masyarakat Islam dalam perspektif Qur'an dan sunnah
- Konsep perubahan masyarakat dalam persektif Islam
- Syuro: prinsip, etika, mekanisme, dan praktik historisnya
- Fiqih ikhtilaf: kaidah dan aplikasinya dalam kehidupan
- **Kepartaian :**
 - Sejarah dan jati diri Partai Keadilan
 - Konstitusi dan Asas Partai Keadilan
 - Ideologi, nilai-nilai, dan manhaj Kepartaian
 - Identitas Partai Keadilan
 - Sanksi-sanksi Organisasi
 - Partai Keadilan dalam format politik di era reformasi
 - Doktrin kejuangan Partai Keadilan
 - Partai Keadilan sebagai partai dakwah
 - Partai Keadilan diantara Partai-Partai Islam
 - Kader Cita Partai Keadilan
 - Strategi Partai Keadilan dalam Transformasi Sosial
 - Partai Keadilan dalam Pemberdayaan Umat
- **Pengenalan struktur dan pengurus partai**
- **Wawasan, yang terdiri dari:**
 - Wawasan Politik, yang meliputi:
 - o Dasar-dasar Politik Islam
 - o Sistem Politik Indonesia
 - o Sistem Hubungan Sosial dalam Islam
 - o Potret realitas politik dunia Islam kontemporer
 - o Pemerintahan dan sosial politik
 - o Sosial kemasyarakatan, dakwah, dan tarbiyah
 - o Saluran Politik
 - o Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin
 - o Dakwah Partai
- **Wawasan sejarah:**
 - o Perjuangan politik umat Islam di Indonesia
 - o Sejarah Perpolitikkan Indonesia
 - o Realitas Politik Islam di Era Khulafa'Rasyidin
 - o Sejarah kejayaan peradaban umat Islam
 - o Perjalanan Gerakan Dakwah Pemuda dan Dakwah di negeri-negeri Muslim *Al-Khashaisul Amal Syar'iyah*
- **Keterampilan:**
 - Pengenalan dasar-dasar organisasi
 - Manajemen organisasi
 - *Leadership*
 - *Problem solving*
 - Teknik diskusi dan pengambilan keputusan
 - Pembentukan Opini Publik
 - Berfikir kreatif
 - *Strategic planning*
 - *public speaking skill*
 - *debating skill*
 - *lobby and negotiating skill*
 - *leadership skill*
 - teknik investigasi
 - teknik mobilisasi massa

- media relations
- analisis wacana
- legal drafting
- budgeting skill
- evaluation skill
- management conflict
- Pengembangan diri (*self development*)
- kepemimpinan (*leadership*)
- Pelengkap
 - Serba-serbi DPC
 - Serba-serbi DPD
 - Serba-serbi DPW
 - Serba-serbi DPP
 - Workshop, membuat perencanaan strategi sebuah DPC/DPRa
 - Workshop: membuat perencanaan strategi sebuah DPD. (Sumber: Diolah dari berbagai dokumen internal PKS, 2000-2007, "Modul Tarbiyah Islamiyah", diterbitkan oleh Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah (LKMT) dan Robbani Press, Jakarta, 2009).

Dari struktur materi yang dipelajari dalam kegiatan Tarbiyah Sisyasiyah PKS sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat diklasifikasikan ke dalam format seperti tertulis pada uraian Tabel 1.

Manhaj pendidikan politik (*tarbiyah sisyasiyah*) yang dimiliki oleh Gerakan Tarbiyah dapat dilihat dari sisi tujuan, cakupan materi yang disampaikan, memberikan peluang gerakan dakwah ini memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi internal pada level individual maupun secara kelembagaan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa dari sisi orientasi Gerakan Tarbiyah memiliki seperangkat pengetahu-

an untuk menjadi media transformasi. Kekuatan kegiatan Tarbiyah sebagai media transformasi memiliki pijakan pada pemahaman yang dimiliki oleh aktivis gerakan ini yang memandang bahwa antara siyasi dan dakwah adalah merupakan satu kesatuan. PKS memandang politik (*siyasi*) dan dakwah sebagai satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan, sehingga strategi pembinaannya ditempuh pada dua sisi, yakni tarbiyah untuk menguatkan eksistensi dakwah dan jama'ah melalui sentuhan *tarbiyah harokiyah* dan tarbiyah untuk menguatkan eksistensi peran politik partai yang dilakukan melalui *tarbiyah hizbiyah* yang di dalamnya terdapat esensi *tarbiyah siyasiyah*. Keduanya terwadahi sebagai *tarbiyah islamiyah* yang pada hakikatnya menekankan setiap kader tarbiyah pada pembentukan *syakhsiyah islamiyah* (kepribadian muslim) sebagai teladan bagi manusia dan *syakhsiyah daiyah* (kepribadian dai) sebagai penyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam (wawancara dengan Takariawan, 24 Maret 2010).

Gerakan Tarbiyah memiliki peluang untuk melakukan transformasi berbasis pendidikan politik (*tarbiyah siyasah*) yang pada akhirnya juga diorientasikan untuk memungkinkan aktivis gerakan ini berpartisipasi politik (*al musyarokah as-siyasi*). Hal ini diawali dengan partisipasi sosial (*musyarokah ijtima'iyah*) dalam bentuk keterlibatan aktif dalam upaya pengokohan dan penyehatan kondisi masyarakat dalam segala aspeknya, *ruhiyah*, *fikriyah*, *jasadiyah*, dan *maliyah*. Dengan basis dukungan masyarakat yang kokoh, langkah berikutnya diharapkan akan menjadi

mudah. Pembentukan institusi politik akan memiliki dukungan publik yang memadai, begitu pula ketika memasuki arena pemilu (*al-intikhobiyah*), memasuki parlemen, maupun pemerintahan (Jasiman, 2005).

Format Pendidikan Politik Transformatif

Menelaah pemikiran politik PKS, termasuk mendasarkan pada konsepsi PKS mengenai politik/*siyasah*, jihad di wilayah politik (*jihad siyasi*), serta de-

ngan berbagai konsepsi dan model pendidikan politik yang telah dijabarkan di atas, dapat disusun format pendidikan politik PKS berdasarkan sekumpulan atribut/ciri dasar yang melekat pada pendidikan politik pada umumnya.

Pemahaman di atas akan dikaji dengan konsepsi pendidikan politik Islam (*tarbiyah siyasiyah islamiyah*), mengingat konsepsi *tarbiyah siyasiyah* PKS lebih dekat serta mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Adapun aspek yang paling pen-

Tabel 1. Manhaj/Sistem Pendidikan Politik PKS

Atribut/ Ciri-ciri Dasar	
Dimensi Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengantarkan manusia menuju kesempurnaannya sebagai makhluk <i>siasah</i>, 2. memunculkan sosok kader yang memahami identitas dan ideologi Islam, 3. memahami strategi pertahanan partai, 4. mendorong aktivitas politik kader maupun masyarakat sebagai bagian dari amal Islami, 5. melakukan penguatan sekaligus peningkatan kapasitas pemahaman, kesadaran, serta partisipasi kader dalam dunia politik, 6. membekali kader untuk dapat memunculkan kultur politik baru, 7. merealisasikan pemberdayaan masyarakat, serta 8. membekali kader agar memiliki kualitas, dan kelaikan, serta sanggup menghadapi tantangan internal maupun eksternal di pentas politik.
Dimensi Metode	Ceramah, diskusi (kelompok/ publik), praktek (berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, provokasi dan advokasi, pengambilan keputusan, manajemen kampanye, dan perencanaan), mandiri (tugas membaca, menulis, dan orasi politik), <i>case study</i> (studi kasus), <i>personal action plan</i> , dan demonstrasi/aksi.
Dimensi Kurikulum Cakupan	Keislaman, kepartaian, pengenalan struktur dan pengurus partai, wawasan (wawasan sejarah dan politik), ketrampilan, dan kelompok materi pelengkap.

Diolah dari berbagai sumber dokumen internal PKS 2000-2007

ting dalam kajian mengenai 'manhaj tarbiyah' model pendidikan politik dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi pokok, yaitu: dimensi tujuan, metode, dan kurikulum cakupan sebagai ciri-ciri dasar yang melekat pada pendidikan politik.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS dipahami sebagai upaya untuk memberikan landasan/fondasi mengenai *siyasah/politik* secara menyeluruh agar setiap kader mampu, senang, dan aktif berperan serta dalam merealisasikan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudharatan. Cara yang ditempuh antara lain: dengan memberikan penerangan serta pemahaman kepada kader tentang berbagai persoalan umat, khususnya yang berkaitan dengan sikap politik kaum muslimin, menanamkan kesadaran tentang pentingnya *Jihad fisabilillah* (upaya pembebasan manusia dari perbudakan manusia lain atau oleh hawa nafsu) sebagai pilar utama dalam menegakkan agama Islam (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2000).

Tujuan pendidikan politik PKS pada fase gerakan dakwah yaitu mewujudkan keberdayaan *siyasah* yang berakar pada doktrin *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai kewajiban setiap muslim sehingga memungkinkan setiap kader menjadi mandiri yang pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi pada pembentukan umat dan masyarakat politik yang mandiri pula (Al-Ghazali, 2001).

PKS melalui pendidikan politiknya hendak pula memberikan batasan-batasan moralitas politik kepada pengurus dan kader, memberikan kerangka

konseptual tentang landasan-landasan syar'i terkait aktivitas berpolitik, serta memberikan penguatan terhadap *mu-syarakah siyasiyah* (partisipasi politik). Dengan demikian, tujuan pendidikan politik PKS pada dasarnya mengalami perluasan sesuai dengan tataran politik yang semakin berkembang, tidak sebatas pada terbentuknya pribadi muslim sebagai kader *siyasah* yang memiliki kesadaran semata, akan tetapi sekaligus kader yang turut serta berpartisipasi dalam bidang politik yang nantinya berpeluang dalam pembentukan kepribadian politiknya (Dzakirin, 2010:14).

Metode yang diaplikasikan PKS dalam pendidikan politik meliputi: ceramah dan diskusi/tanya jawab yang dilakukan pada forum *halaqoh*, dan sarana lain, yakni: *tatsqif* (*tarbiyah tsaqofiyah*), pelatihan (*training*), antara lain: Training Dasar (TD), yang meliputi: TD-I dan TD-II, Training Lanjutan (TL), TMKS), dan kajian (Kajian Ilmu Sosial Politik (KISP), yang meliputi: KISP-I, KISP-II, dan KISP-III) dengan metode tambahan yang berupa: praktek, mandiri, *case study* (studi kasus), panel, serta *personal action plan*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode pendidikan politik PKS semakin variatif dalam perkembangannya dari gerakan dakwah sampai saat ini.

Ridha (2002:43) menyatakan bahwa muatan-muatan utama yang senantiasa menjadi fokus *tarbiyah siyasiyah* pada dasarnya meliputi tiga hal. Pertama, prinsip dan pokok-pokok pemikiran yang dapat membentuk wawasan *siyasah*, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya ten-

tang ideologi dan doktrin-doktrin *siasah*. Kedua, tujuan yang ingin dicapai, misalnya tumbuhnya kepribadian, kesadaran, dan partisipasi *siasah*. Ketiga berkaitan dengan sarana, lembaga, dan metode yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Materi dalam pendidikan politik bukan sesuatu yang masih dalam proses tawar-menawar, tetapi bagian dari suatu aspek yang ingin diperjuangkan sehingga perlu dipersiapkan suatu proses belajar yang sistematis. Secara ideal, materi pendidikan politik ditentukan melalui proses interaksi agar menjadi proses dialektis, bukan proses yang satu arah (Mahardika, 2001:93).

Kurikulum cakupan dalam sistem/model pendidikan politik PKS dapat diklasifikasikan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yang meliputi kelompok materi: keislaman, kepartaian, pengenalan struktural PKS, wawasan politik dan sejarah, keterampilan/*skill*, dan pelengkap dengan penekanan sekaligus penguatan pada aspek keterampilan (*skill*), yang meliputi: pengembangan diri dan kepemimpinan, manajemen dan organisasi, pemerintahan dan sosial politik serta penguatan *analysis capability* (kapabilitas analisis), yang meliputi: analisis hukum lokal, analisis ekonomi lokal, analisis sosial dan budaya lokal, analisis politik lokal, analisis birokrasi lokal yang diprioritaskan bagi caleg. Dapat dipahami bahwa kurikulum cakupan pendidikan politik PKS terutama ditujukan pada pemberdayaan pengurus dan peran anggota legislatif (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2001).

Untuk merealisasikan tujuan, tidak hanya ditempuh melalui metode indoktrinasi seputar ideologi PKS, dan doktrin *siasah*, tetapi juga mencakup metode yang menggunakan sistem belajar (persekolahan/perkuliahahan) sebagaimana halnya *tatsqif*, sekolah pengurus, dan sekolah politik. Semua itu diimplementasikan PKS sebagai cara untuk menamakan pemahaman politik melalui penyampaian materi *siasah*, serta menyediakan praktek lapangan dan pelatihan *siasah*, yang meliputi: keterampilan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, *team building* dan produktivitas tim, teknik provokasi dan advokasi, keterampilan administrasi, jurnalistik, analisis SWOT, pengambilan keputusan, manajemen kampanye, teknik perencanaan dan lain sebagainya sebagai pembekalan pengalaman individu yang diharapkan dapat mengembangkan potensi kemampuan *siasah* kader (Modul Tarbiyah Islamiyah untuk Murobbi, 2009).

Tujuan pendidikan politik tidak sebatas memberikan kesadaran dan partisipasi politik secara konseptual-teoretis, tetapi sekaligus memberikan keteladanan politik praktis sebagai manifestasi kristalisasi kepribadian politik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa melalui sistem pendidikan politiknya, PKS hendak membangun legitimasi publik dengan komitmen dan konsistensinya dalam aktivitas dakwah politik sehingga memiliki peluang mengikis keputusan masyarakat akan perubahan ke arah yang lebih baik pada bangsa ini (Dzakirin, 2010). Tujuan pendidikan politik PKS tersebut dalam batas tertentu merupakan respon dan solusi pada realitas kehidupan politik yang ada pada

masyarakat yang mulai jauh dari nilai-nilai ideal (Denoeux, 2007).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka menanamkan pengetahuan mengenai moralitas politik Islam adalah menjadi keniscayaan bagi gerakan apapun yang mengatasnamakan 'Islam' karena sesungguhnya dalam koridor ini Islam tidak bisa sekedar diposisikan sebagai *platform* yang tidak mampu menunjukkan identitas gerakan dan justru lemah terhadap dominasi kekuasaan negara, akan tetapi harus dijadikan sebagai acuan nilai yang akan melahirkan sikap, perilaku, serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam secara konsisten (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2000).

Penguatan tujuan pendidikan politik PKS diarahkan pula untuk memberikan kerangka konseptual tentang aktivitas politik yang Islami dalam rangka menumbuhkan kesadaran politik kader. Landasan yang penting dibangun adalah mengenai keberadaan politik serta partai politik itu sendiri. Bahasan tentang politik pada dasarnya akan berkaitan erat dengan negara, masalah kekuasaan, otoritas, serta konflik (Rozak, 1999:41).

PKS sebagai salah satu representasi dari kelahiran Gerakan Islam (Islam politik) di Indonesia memaknai politik sebagai bagian dari Islam yang bersifat *syamil*/menyeluruh yang pada hakikatnya juga mengatur seluk-beluk interaksi kehidupan umatnya, termasuk masalah politik. Dari berbagai pemikiran serta aktivitas yang dilakukan oleh PKS sebagai manifestasi dari Islam politik dapat ditangkap bahwa ia berupaya untuk mewujudkan pola hubungan Islam

dengan negara menjadi semakin terintegrasi, namun tetap kritis terhadap pemerintah yang berkuasa dengan senantiasa mendasarkan aktivitas perjuangannya pada nilai-nilai Islam. Gerakan politik moral yang diperlihatkan oleh kader-kader PKS turut memberikan nuansa yang berbeda pada format pendidikan politik yang dapat dipahami sebagai wujud perhatian PKS untuk turut memikul tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dengan demikian, format pendidikan politik PKS pada dasarnya searah dengan sistem pendidikan politik Islam. Dalam tataran tujuan, format pendidikan politik yang hendak dibangun oleh PKS adalah model pendidikan politik yang dapat mengantarkan manusia menuju kesempurnaan sebagai makhluk *siasah*, memunculkan sosok kader yang memahami identitas dan ideologi Islam, memahami strategi pertahanan partai, mampu mendorong aktivitas politik kader maupun masyarakat sebagai bagian dari amal Islami. Selain itu, melakukan penguatan sekaligus peningkatan kapasitas pemahaman, kesadaran, serta partisipasi kader dalam dunia politik, membekali kader untuk dapat memunculkan kultur politik baru, mampu merealisasikan pemberdayaan masyarakat, serta mampu membekali kader agar memiliki kualitas, dan kelaik-an, serta sanggup menghadapi tantangan internal maupun eksternal di pentas politik. Dengan demikian, kader dan pengurus PKS diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi yang dibutuhkan oleh umat Islam (Al Qordhowy, 2004).

Dalam realitasnya, tujuan pendidikan politik PKS yang dipraktikkan sampai dengan Pemilu 2009 masih menggunakan model yang konvensional. Secara umum, belum mampu menghasilkan kader yang mampu untuk menghadapi tantangan dan medan politik yang baru di Indonesia, masih banyak kader PKS yang gamang. Sementara itu, dalam tataran dimensi metode dan cakupan kurikulum pada dasarnya diorientasikan pada pengembangan model pendidikan politik Islam agar mampu mencapai sasaran *siasah islamiyah* dalam tataran politik saat ini (wawancara dengan Abu Ridha, 30 Agustus 2010).

Dilema dan Keterbatasan Model Pendidikan Politik PKS

Dari perspektif sebagaimana dikemukakan tentang *manhaj* pendidikan politik yang dimiliki oleh Gerakan Tarbiyah (PKS), kiranya dapat dielaborasi lebih rinci. Ada Beberapa keterbatasan *manhaj*/sistem pendidikan politik yang dieksperimenkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari pencermatan yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik serta penelaahan dokumen ditemukan berbagai keterbatasan sebagai berikut.

- *Manhaj*/sistem pendidikan politik sejak awal sangat kuat dipengaruhi oleh model-model pendidikan untuk lingkungan kampus dengan segmen peserta dari kalangan terpelajar, mudah menyerap informasi, kebanyakan kelas menengah. Maka ketika model pendidikan politik tersebut dipakai untuk memperluas basis
- dukungan PKS ke basis massa yang lebih luas, misalnya masyarakat pedesaan, kalangan petani, kalangan buruh, orang-orang yang kurang terpelajar, komunitas yang secara sosiologis bukan dari kalangan santri mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk dikembangkan.
- *Manhaj* pendidikan politik PKS yang diinspirasi oleh *Manhaj* Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, membutuhkan revisi, modifikasi, adaptasi dengan mengingat faktor kondisi dan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. *Manhaj* pendidikan politik PKS masih memerlukan adaptasi dari berbagai aspek untuk dapat digunakan bagi kepentingan memperluas basis dukungan. Adaptasi tersebut terkait dengan penyerderhanaan materi (isu-isu yang akan dibagikan); adaptasi model pembelajarannya; penyerderhanaan bahasa yang digunakan; simbol-simbol kultural yang memungkinkan untuk dipahami oleh kalangan bawah; penyerderhanaan bahasa-bahasa ideologis yang abstrak menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh kalangan bawah. Orientasi pendidikan politik yang terlalu ideologis yang melahirkan *output* dengan sosok kader PKS yang ideologis, militan, kurang komunikatif secara budaya dan simbol dapat dinyatakan sebagai salah bentuk keterbatasan *manhaj tarbiyah siyashah* yang dimiliki PKS.
- Dari pengamatan yang dilakukan, ditemukan bahwa hanya sedikit kader partai yang dapat melampaui tahapan-tahapan pengkaderan yang dilakukan oleh PKS. Kondisi terse-

but menyebabkan banyak calon kader yang patah ditengah jalan, tidak meneruskan pengkaderan pada tahap selanjutnya. Hal-hal yang menyebabkan terputusnya pengkaderan (kehilangan calon kader) antara lain (1) belum tersedianya instruktur yang memiliki kompetensi keilmuan yang dibutuhkan oleh anggota; (2) karena adanya orientasi yang kurang jelas; (3) materi dan proses pengkaderan tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anggota; dan (4) anggota pemula merasa bosan karena proses yang terlalu panjang dan sebeginian merasa terlalu berat.

- Secara kuantitatif, jarang sekali ditemukan jumlah anggota yang mengikuti pengkaderan yang dapat bertahan dari tahapan awal sampai akhir tanpa mengalami penyusutan jumlah. Sering terjadi proses penyusutan tersebut sangat dratis.
- Model pendidikan politik yang dimiliki oleh PKS sekalipun terbukti telah mampu menghasilkan kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan pada partai, akan tetapi model pendidikan politik PKS masih memiliki keterbatasan dan kelemahan untuk dapat menembus basis massa yang lebih luas. Hal tersebut dikonfirmasi oleh hasil perolehan suara PKS dari tiga kali pemilu masih disekitar angka 7%. Capaian PKS belum bisa menembus angka di atas 10-15% suara nasional.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tentang dilema pendidikan politik sebagai basis transformasi, dapat dibuat suatu pernyataan bahwa Ge-

rakan Tarbiyah secara internal pada dirinya dalam batas tertentu telah mampu melakukan suatu proses transformasi institusional dari semula mengambil bentuk kelembagaan yang bersifat *informal organization* (gerakan bawah tanah) yang terkenal dengan *Jemaah Tarbiyah* pada masa pemerintahan Orde Baru dalam rentang tahun 1980-an sampai akhir 1990-an berubah menjadi suatu partai politik yang bersifat organisasi formal, masuk dalam struktur politik formal yang absah di Indonesia (Macmudi, 2008:125-130). Namun, harus segera ditambahkan bahwa kemampuan Gerakan Tarbiyah dengan *Manhaj* Tarbiyahnya menghadapi keterbatasan dan dilema dalam melakukan proses transformasi, baik transformasi internal maupun eksternal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- *Manhaj* pendidikan politik yang dalam derajat tertentu telah berperan untuk terjadinya transformasi gerakan, yakni dari Gerakan Tarbiyah berubah mengalami metamorfosa menjadi gerakan politik dalam bentuk partai politik.
- *Manhaj* pendidikan politik dalam perkembangan selanjutnya ketika berada pada fase gerakan memasuki gerakan politik, mengalami dilema untuk tetap dapat berperan mendorong terjadinya transformasi dikarenakan adanya pergeseran orientasi pendidikan politik lebih berfungsi sebagai pewarisan nilai-nilai dan

pemberi legitimasi kebijakan yang diambil oleh elit politik. Pada fase gerakan politik, fungsi pendidikan politik menumbuhkan kesadaran kritis dan membangun sistem yang ideal menjadi tereduksi.

Saran

- Manhaj pendidikan politik Jemaah Tarbiyah perlu dilakukan kontekstualisasi dengan kondisi keindonesiaan supaya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas.
- Jalan keluar untuk mengatasi dilema yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan politik diperlukan kebijakan yang konsisten dalam hal orientasi dari arah pendidikan politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Purwosantoso, M.A. dan Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. atas kebaikan hati dan ketulusannya memberikan limpahan ilmu dan bimbingan yang hangat selama proses penelitian dan penulisan naskah disertasi berlangsung di Program Studi Ilmu Politik S3 Fisipol UGM. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Jemaah Tarbiyah yang telah berbaik hati untuk menerima penulis melakukan serangkaian wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Denoeux, Guilain, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1105/10/0804.htm>/ 3 Oktober 2007.

Dzakirin, Ahmad. 2010. *Tarbiyah Siyasi Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*. Surakarta: Adicitra Intermedia.

Gutmann, Amy. 1999. *Democratic Education*. New Jersey: Princeton University Press.

Kurikulum Tarbiyah Islamiyah Buku 1, Buku 2. 2000. Solo: Tim Kerja Penyusunan Kurikulum.

Modul Tarbiyah Islamiyah untuk Murobbi. 2009. Jakarta: Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah (LKMT) dan Robbani Press.

Renshon, Stanley Allen. 1977. *Handbooks of Political Socialization Theory and Research*. London: The Free Press a division of Macmillan Publishing Co.

Ridha, Abu. 2002. *Tarbiyah Syasah*. Jakarta: Penerbit Syamil.

Rosamond, Ben. 2002. *Politics: an Introduction (Second Edition)*. London: Routledge.

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Jurnal Ilmiah Pendidikan

Mei 2012, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Pengembangan Model Penilaian Otentik Penjasorkes Materi Permainan Invasi Bolabasket di Sekolah Dasar

Tomoliyus (Universitas Negeri Yogyakarta)

Pendidikan Nilai Holistik untuk Membangun Karakter Anak di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta

Rukiyati (Universitas Negeri Yogyakarta)

Pengembangan Bahan Ajar Seni Musik Berbasis Pembelajaran Kontekstual

Ardipal (Universitas Negeri Padang)

Pendidikan Khusus pada Awal Menuju Inklusi (Sebuah Refleksi Historis di Jawa)

Mumpuniarti (Universitas Negeri Yogyakarta)

Implementasi Manajemen Stratejik Berbasis Kemitraan dalam Meningkatkan Mutu SMK

Zainal Arifin (Universitas Negeri Yogyakarta)

Evaluasi Program Pembinaan Cabang Olahraga Karate di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sugeng Purwanto (Universitas Negeri Yogyakarta)

Pengembangan Tes Diagnostik Bahasa Prancis melalui Analisis Kesalahan Berbahasa

Dwiyanto Djoko Pranowo (Universitas Negeri Yogyakarta)

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Sunarso, Sodik Azis Kuntoro, dan Abdul Gafur (Universitas Negeri Yogyakarta)

Model Unit Produksi SMK: Studi Kasus di SMKN 2 Pengasih Kulon Progo Yogyakarta

Tawardjono Us. (Universitas Negeri Yogyakarta)

Dinamika Struktur dan Kultur dalam Penerapan Desentralisasi Pendidikan

Siti Irene Astuti D. (Universitas Negeri Yogyakarta)

Dilema Pendidikan Politik sebagai Basis Transformasi Gerakan

Nasiwan (Universitas Negeri Yogyakarta)